

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DIBIDANG  
PEMBANGUNAN**

**Andri Jasman<sup>1</sup>, Malik<sup>2</sup>, Budi Waskito<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Bandar Lampung<sup>1,2,3</sup>  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar Lampung,  
Indonesia.

**Email:**

[Malik@ubl.ac.id](mailto:Malik@ubl.ac.id)

**ABSTRAK**

The problems in this research are (1) How the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Functions in Developing Policies in the Development Sector of Mesuji Regency is one of the issues with this study. (2) What factors limit the Regional Development Planning Agency's (Bappeda) ability to formulate policies for the Mesuji Regency's development sector. This research design uses qualitative research with qualitative descriptive analysis method. The research design intends to describe and qualitatively examine the Role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in Formulating Policies in the Development Sector of Mesuji Regency. The findings revealed that: (1) The Regional Development Planning Agency's (Bappeda) role in developing policies for the Mesuji Regency's development sector has been carried out in accordance with its role as a formal authority. Strategic decisions, development planning based on the bottom-up principle, namely the process of compiling development plans from the District and Regional Apparatus Organizations (OPD) by taking into account the needs and aspirations that are prioritized, and top-down planning with the principle that the process of formulating development plans in the District and OPD, it needs to synergize.

**Kata Kunci: Role, Planning Agency.**

**Latar Belakang Masalah**

Sistem perencanaan pembangunan daerah diatur oleh Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dimana melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan baik kabupaten/kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pemmbangunan daerah dijalankan sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka Panjang, menengah dan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala daerah Bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang kemudian disebut Bappeda, Bappeda merupakan badan yang memiliki peran penting membantu Kepala daerah dalam melakukan perumusan perencanaan pembangunan dan menentukan kebijakan perencanaan pembangunan serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD berjalan melalui mekanisme koordinasi yang dijalankan oleh Bappeda selaku coordinator tunggal sesuai dengan tugas pokoknya membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kabupaten Mesuji merupakan salah satu badan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang memiliki tugas pokok membantu pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dalam melaksanakan pembangunan secara optimal. Sebagai salah satu birokrasi pemerintahan Bappeda Kabupaten Mesuji harus mampu menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dari tingkat Desa dan Kecamatan serta melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut. Tugas dan wewenang BAPPEDA salah satunya ialah dengan melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan kepala daerah sebagai penentu pembangunan daerah (Rini, 2017)

Berdasarkan fenomena penelitian Peranan Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji saat ini belum terlaksana secara optimal, terutama dalam penyusunan kebijakan dibidang pembangunan Kabupaten Mesuji. Dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji belum mampu mewujudkan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Realisasi rencana program kerja yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mesuji berupa pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kabupaten Mesuji belum menjadi prioritas utama pada tingkat penetapan Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji. Yang kemudian berdampak pada lambatnya proses peningkatan sumberdaya Bappeda, dimana kelemahan ini berpengaruh pada sistem penyusunan kebijakan perencanaan dibidang pembangunan yang menjadi kurang optimal. Tidak efektif dan efisiennya kebijakan pembangunan di kabupaten Mesuji diakibatkan keterlambatan dalam penyusunan rencana pembangunan. Sedangkan Secara teknis BAPPEDA mempunyai peranan utama dalam perencanaan dan penyusunan rencana pembangunan (Munira, 2019).

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji belum terlaksana secara optimal sehingga sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam melaksanakan proses pembangunan masih minim. Dengan demikian Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Mesuji yakni penyusunan kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan kebijakan perencanaan program dan penyusunan kebijakan perencanaan kegiatan serta mengumpulkan informasi tentang rencana pembangunan di Kabupaten Mesuji dianggap belum aspiratif. Selain itu, penyusunan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Mesuji tidak menganut prinsip (*bottom up*). Dengan demikian penyusunan kebijakan usulan program kerja yang telah direalisasikan dan dianggarkan serta dievaluasi program kerja yang belum terealisasi dan masing kurang efektif. Sedangkan perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah (Fahrizanur & Burhanudin, 2017).

Tidak efektifnya pelaksanaan program kerja sehingga usulan perencanaan pembangunan yang berupa sarana dan prasarana Kabupaten Mesuji belum terlaksana secara maksimal. penyusunan kebijakan Bappeda dalam perencanaan anggaran. perencanaan atau penyusunan

program dan perencanaan kegiatan dianggap kurang maksimal dalam tahap rapat koordinasi dan sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mesuji. Dengan demikian penggunaan anggaran untuk sektor sarana prasarana juga tidak maksimal jika dilihat dari realisasi usulan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mesuji. Fenomena tersebut perlu dikaji untuk menemukan jawaban atas fakta-fakta empiris yang terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji, melalui penelitian yang akan membahas mengenai Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji. Dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji. Dan Aspek-aspek apa saja yang menghambat Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji.

### **Tinjauan Pustaka**

Badan Perencanaan pembangunan Daerah atau Bappeda merupakan badan yang memiliki peranan dalam melakukan penyusunan perencanaan daerah, dimana perencanaan daerah tidak hanya memuat dokumen perencanaan namun juga harus memperhatikan secara mendasar visi dan misi daerah (Kuncoro, 2018). Menurut (Tompo et al., 2012) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah secara optimal. Peran Bappeda menurut (Dewi & Zakia, 2022) meliputi bidang Infrastruktur dimana Bappeda menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui RPJD, RPJMD dan RKPD. Keberadaan Bappeda dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah menjadi salah satu unsur penunjang utama keberhasilan pembangunan pemerintah daerah (Kurnia, 2021). Secara teknis peranan Bappeda yakni meliputi perencanaan pembangunan, penyelenggaraan koordinasi dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan serta merealisasikannya (Mashum & Soemitra, 2022).

Perencanaan pembangunan dalam suatu negara atau masyarakat diusahakan oleh pemerintah sebagai output pemerintah selaku perencana utama dalam pembangunan daerah (Kholik, 2020). Perencanaan pembangunan meliputi upaya yang dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana-rencana secara bersama-sama antara beberapa pihak untuk mewujudkan pembangunan daerah secara optimal (Hajar et al., 2022). Mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan partisipasi yang optimal sebagai syarat utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yang baik (Simanjuntak & Silitonga, 2020). Menurut (Muhaemin, 2021) perencanaan pembangunan dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu dokumen pembangunan pada tahun sebelumnya sehingga pembangunan daerah dapat lebih optimal. (Septiana & Salahudin, 2021) perencanaan pembangunan yang optimal didukung oleh koordinasi dan Pendidikan para pelaku perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan khusus dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda guna membuat kebijakan pembangunan daerah secara optimal dan terintegrasi. (Sofianto, 2019).

Kebijakan pembangunan daerah merupakan program-program yang diprioritaskan termuat dalam RPJMD (Fanggidae & Manafe, 2019). Kebijakan pembangunan merupakan penetapan arah pembangunan daerah guna mengevaluasi hasil pembangunan daerah (Muljanto, 2021). Kebijakan pembangunan dirumuskan untuk mendukung dan mengelola pembangunan suatu daerah serta mengontrol dengan baik pembangunan yang berlangsung (Mahameru, 2021). Kebijakan pembangunan merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang diterapkan sebagai upaya pengoptimalan pembangunan daerah, (Ginting & Ratnasari, 2022). Kebijakan pembangunan secara holistic diharuskan memuat kebutuhan dasar masyarakat daerah (Tupan & Setiorini, 2022).

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam yang dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode penelitian kualitatif menurut (Anggito & Setiawan, 2018) merupakan metode penelitian yang membahas konsep teoritis yang berlandaskan filsafat post positivism digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diambil melalui Teknik Snowball Sampling terhadap informan-informan yang dirasa mengetahui secara mendalam mengenai Peran badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dalam penyusunan kebijakan di bidang pembangunan Kabupaten Mesuji. Kemudian dilakukan pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah itu dilakukan analisis data secara kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Mesuji dalam penyusunan kebijakan bidang Pembangunan membutuhkan alternatif-alternatif yang signifikan sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Siswanto (2012) dimana Peran Bappeda yakni menyusun kebijakan pembangunan berlandaskan peran secara otoritas formal, peran sebagai pusat informasi, dan peran keputusan-keputusan strategis, dengan hasil sebagai berikut

#### **1. Peran Secara Otoritas Formal**

Kebijakan dalam bidang pembangunan pada Kabupaten Mesuji dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda yang berperan sebagai instansi dengan tanggung jawab menyusun kebijakan atas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Mesuji. Sesuai dengan Peraturan Bupati Mesuji No 48 tahun 2016 tentang tata kerja, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah kabupaten Mesuji yang menegaskan bahwa Bappeda memiliki tanggung jawab melakukan penyusunan kebijakan dan melakukan perencanaan pembangunan dibidang pembangunan. Badan perencanaan pembangunan memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam penyusunan kebijakan dibidang pembangunan dimana semua program pembangunan harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran melalui koordinasi dengan pihak terkait seperti instansi-instansi terkait.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Mesuji memiliki peran

utama dalam mengoptimalkan kebijakan pembangunan terutama dalam menyusun program pembangunan. Para pegawai Bappeda memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bidang dan bagiannya hal ini merupakan bagian dari tanggungjawab Bappeda sehingga pembangunan dikabupaten Mesuji dapat berjalan dengan optimal. Melalui sub bagian keuangan Bappeda menyusun Perencanaan anggaran khusus pada sektor pembangunan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembangunan dan kuantitas sarana serta prasarana yang ada misalnya kualitas sarana pendidikan atau sekolah, maka pihak Dinas Pendidikan memerlukan koordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji karena itu pihak Bappeda melakukan koordinasi secara langsung dan terbuka melalui musyawarah atau rapat dengan tujuan menyampaikan rencana pembangunan diberbagai sector untuk setiap tahun berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai perencana anggaran di Kabupaten Mesuji, yang disediakan untuk setiap tahunnya yang sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji. Berdasarkan ketersediaan anggaran maka pihak Bappeda Kabupaten Mesuji melakukan koordinasi perencanaan pembangunan khususnya kecamatan dan OPD di Kabupaten Mesuji. staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kabupaten Mesuji selalu melaksanakan tugas yang diberikan secara otoritas formal, yaitu menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dan OPD, yang ada di Wilayah Kabupaten Mesuji.

Organisasi harus memiliki sistem tepat yang berjalan dengan baik sehingga unit-unit atau bagian dalam organsiasi mampu melaksanakan tugas dan mencapai sasaran sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, selain itu melalui sistem yang diterapkan organisasi dapat membangun koordinasi antar bagian dan unit yang ada diorganisasi dimana koordinasi ini akan bermanfaat untuk mencapai tujuan perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan secara lebih efisien. Untuk itulah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat membutuhkan sistem untuk melaksanakan mekanisme penyusunan program pembangunan di Kabupaten Mesuji, sesuai dengan pendapat (Simanjuntak & Silitonga, 2020) dimana Mekanisme perencanaan pemangunan membutuhkan partisipasi yang optimal sebagai syarat utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yang baik.

## **2. Peran Sebagai Pusat Informasi.**

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Mesuji merupakan tugas dari badan perencanaan pembangunan di kabupaten Mesuji dimana dalam pelaksanaannya Bappeda juga berperan sebagai pusat informasi terkait dengan kegiatan perencanaan dan penyusunan pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji. Sebagai pusat informasi Bappeda selalu mengupayakan pelaksanaan tugas yang baik melalui koordinasi dengan kecamatan dan dinas-dinas terkait untuk menyampaikan informmasi terkait dengan perencanaan maupun penyusunan program pembangunan di Kabupaten Mesuji sehingga efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji merupakan Istanasi yang menjadi pusat informasi pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji Selalu berkoordinasi dengan berbagai Kelurahan dan Dinas-dinas yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji, untuk memberikan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan

yang adadi Kabupaten Mesuji. Prasyarat utama dalam pelaksanaan penyusunan program oleh badan Perencanaan pembangunan diantaranya dengan melibatkan kesadaran, dan menentukan sasaran yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mesuji, kemudian syarat pokoknya ialah komunikasi yang berjalan dengan baik oleh karena setiap pelaksana kegiatan yang diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang sesuai sasaran. Setiap Perencanaan pembangunan yang diusulkan dari Kecamatan dan OPD, untuk dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sebagai pusat informasi, agar yang diusulkan dapat diterima sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Dengan demikian bahwa program yang diusulkan dari Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian diperiksa oleh pihak Bappeda dan dilakukan koordinasi untuk membangun sistem penyusunan kebijakan pembangunan yang berjalan dengan baik sesuai tujuan ditunjang dengan mekanisme penyusunan perencanaan mulai dari sistem, koordinasi dan Kerjasama antar bidang pada Bappeda Kabupaten Mesuji. Pegawai yang ada di badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan profesinya, kemudian secara parsial pegawai melaksanakan tugas secara maksimal didukung dengan fasilitas dan kebijakan yang dibuat serta persiapan komprehensif.

Perencanaan program kerja tahunan yang kemudian diintegrasikan dengan usulan program kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) terkait. termasuk dengan Kecamatan yang ada, yang selalu berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Mesuji. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji melalui bagian penyusunan program kerja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun rencana program kerja tahunan, melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabupaten Mesuji, sehubungan dengan program kerja yang telah diajukan untuk diproses dan sinkronisasikan program perencanaan pembangunan dari Bappeda Kabupaten Mesuji. Bappeda memiliki peran menyampaikan informasi terkait dengan tugas dan fungsi sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana peran Bappeda terutama dalam pembangunan (Fadila et al., 2021).

### **3. Peran Keputusan-Keputusan Yang Strategi**

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji, sangat strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan, khususnya di dalam peningkatan penyusunan rencana kegiatan operasional program kerja dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rencana kegiatan tahunan. Sehubungan hal tersebut maka program kerja yang di usulkan oleh Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji melakukan verifikasi dalam hal penyusunan rencana kegiatan operasional program kerja tahunan khususnya pada Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mesuji, sebelum diputuskan untuk program yang bias dibiayai atau tertunda.

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, dalam penyusunan kebijakan dibidang pembangunan, merupakan keputusan yang sangat strategis untuk mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Mesuji, sebagai tugas pokok adalah

melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan program kerja tahunan dan membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan program kerja dan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) terkait sehubungan pelaksanaan program kerja. Pentingnya Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, dalam penyusunan kebijakan dibidang pembangunan yang dapat mengintegrasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mesuji, Selain itu pentingnya keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan nampak sampai sejauh mana pelaksanaan fungsi dalam mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuan secara menyeluruh dan bukan pencapaian tujuan bagian-bagian atau unit-unit organisasi. Hal ini penting karena umumnya aktivitas-aktivitas itu perlu diintegrasikan dengan aktivitas-aktivitas unit lainnya untuk mencapai tujuan umum.

Salah satu peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu menjadi penting dalam pembangunan ialah karena adanya perbedaan- perbedaan kepentingan dalam setiap instansi seperti satuan pekerjaan. Perbedaan- perbedaan itu memang ada karena keharusan untuk mengadakan pembagian kosekuensi berorganisasi, mempunyai masing-masing bidang tugas. Itulah sebabnya, tanpa koordinasi ada kecenderungan atau kemungkinan masing-masing spesialis itu akan berjalan sendiri-sendiri yang bisa saja menuju keberbagai arah atau tidak pernah bertemu pada tujuan yang sama. semua usulan perencanaan yang bersumber dari bawah Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) kami melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan program kerja tahunan dan membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan program kerja dan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan pihak OPD terkait sehubungan pelaksanaan program kerja.

Salah satu upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, dalam meningkatkan penyusunan kebijakan dibidang pembangunan, yaitu dengan menyediakan fasilitas on line, hal tersebut menunjukan bukti nyata bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, telah berbenahdiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan kebijakan dibidang pembangunan, dengan menyiapkan fasilitas on line, dengan demikian bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan saat ini sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, sangat sesuai dengan perkembangan saat ini, karena dengan tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan, dapat menjadi suatu keputusan yang strategi dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Mesuji.

Kemajuan pembangunan di Kabupaten Mesuji tidak terlepas dari peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, sebagai salah satu coordinator dalam penyusunan kebijakan dibidang pembangunan dalam melihat kinerja Daerah, diharapkan dapat meningkatkan tugas dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyusunan kebijakan dalam bidang pembangunan. Selain itu juga sebagai penyelenggaraan pelayanan, secara arif serta bijaksana, meningkatkan motivasi, pengetahuan, ketrampilan dan sikap kearah profesionalitas kerja pegawai, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan kediplinan dalam memberikan pelayanan kepada instansi terkait dengan tugas tersebut. Menurut (Sofianto, 2019) Perencanaan pembangunan dilakukan

oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan khusus dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda guna membuat kebijakan pembangunan daerah secara optimal dan terintegrasi.

#### 4. Aspek-Aspek yang menghambat.

Untuk membahas tentang aspek-aspek penghambat Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (pegawai) yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, relative kurang jumlahnya, sehingga dalam pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan, sering tidak optimal.
2. Kurangnya berbagai fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan, seperti keterbatasan computer yang ada sehingga dapat mengganggu kalancaran pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan.
3. Keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan di Kabupaten Mesuji, sehingga pelaksanaan koordinasi sering kurang optimal, karena terkadang program yang dianggap sangat penting tetapi tidak diakomodir karena pegawai yang ditugaskan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mempunyai latar belakang kemampuan yang relative rendah.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan Kabupaten Mesuji melalui (a) Secara otoritas formal, telah terlaksana sesuai peranannya (b) Sebagai pusat informasi, telah menjadi pusat informasi pembangunan, (c) Keputusan- keputusan yang strategis, perencanaan pembangunan dengan prinsip *bottom up* yakni proses penyusunan rencana pembangunan dari Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang menjadi skala prioritas, perencanaan *top down* dengan prinsip bahwa proses penyusunan rencana pembangunan di Kecamatan dan OPD, perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan.
2. Sedangkan aspek-aspek yang menghambat (1) Sumber daya manusia (pegawai) yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, relative kurang jumlahnya, sehingga dalam pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan, sering tidak optimal. (2) Kurangnya berbagai fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan, serta seringnya padam lampulistrik dalam waktu yang lama. (3) Keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan di Kabupaten Mesuji, sehingga pelaksanaan koordinasi sering kurang optimal.



## Daftar Pustaka

- Al Ma'shum, N. H. H., & Soemitra, A. (2022). Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappeda Su) Terhadap Pembangunan Daerah Di Wilayah Sumatera Utara. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 3396-3400.
- Anggito, Albi., Setiawan, Johan. 2018. Metodologi penelitian kualitatif. (Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Budiman, Arif. 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, M., & Zakia, Z. (2022). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat. *Tameh: Journal of Civil Engineering*, 11(2), 62-73.
- Djojonegoro. 1996, Teori Sosial Dan Pembangunan Indonesia : Suatu Kajian Melalui Diskusi. Bandung: Primaco Academika.
- Emilia, Emi, 2008, Menulis Tesis dan Disertasi, Alfabeta, Bandung
- Fadila, O. A., Mahrizal, M., & Khalijah, S. (2021). Efektivitas peran bappeda dalam pembangunan kota medan. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 7(2), 133-144
- Fahrizanur, D., Si, R. K. M., & Burhanudin, H. (2017). . Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser. *Ejournal Fisip Unmul*. 2(2).
- Fanggidae, H. K., & Manafe, M. W. (2019). Evaluasi anggaran belanja sebagai alat pengendalian kebijakan pembangunan pada Pemerintah Daerah. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(02), 45-52.
- Garna, Yudistira K. ed. 1993. Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara. Bandung: Program Pascaasarjana Universitas Padjadjaran.
- Gibson, James L, et.al , 1999. Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses, Jilid I, Binarupa, Jakarta.
- Ginting, N. M., & Ratnasari, N. E. (2022). Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal Kebijakan Berkelanjutan Untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 175-181.
- Hadi, 2001, Administrasi Pembangunan, Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Daerah 2021 (Vol. 1). umsu press.
- Handyaningrat, S, 1986, Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Haji Masagung, Jakarta:
- Hasibuan, H. Malayu, SP, 2009, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta
- Henry, Nicolas, 1998, Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan, Rajawali Press, Jakarta.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56-70.
- Kuncoro, M. (2018). Perencanaan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama.

- KURNIA, Y. (2021). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Rancangan Rkpd Kota Sungai Penuh: Yuri Kurnia, S. Ap. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(7), 99-112.
- Mahameru, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 120-135.
- Muhaemin, N. M. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 4(1), 201-222.
- Muljanto, M. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169-181.
- Munira, W. (2019). Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): Perannya Dalam Pembangunan Kota Banda Aceh (1983-2015). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 2(2).
- Permen Nomor 54 Tahun 2010 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Permendagri 57/2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- Rini, S. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Di Kecamatan Samarinda Ulu). *Jurnal Administrasi Negara*. Vol, 5, 5948-5961.
- Septiana, Y., & Salahudin, S. (2021). Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan: Sebuah kajian pustaka terstruktur. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 9(1).
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung
- Simon, Herbert, A, 1982, *Administrasi Behavior*, Terjemahan: ST Dianjung, Bina Aksara, Jakarta.
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. M. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan: Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97-112.
- Siswanto (2012 : 21), *Administrasi Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta
- Siagian, SP. 2002, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25-41.
- Tupan, T., & Setiorini, R. A. (2022). Narative Review Konten Publikasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Wilayah Perbatasan. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 14(1), 39-49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional